



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

***RENCANA KERJA***  
**TAHUN 2023**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023

memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Magelang, Juli 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG



**SUSILOWATI, SE, MT, M.Sc**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19721101 199803 2 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	86
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	91
2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	91
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	93
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional .....	93
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan ...	94
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 .....	95
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	95
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	122
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	124
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	124
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	126
3.3 Program dan Kegiatan .....	129
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	164
BAB V PENUTUP .....	192

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021.....	8
Tabel 2.2.1 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	12
Tabel 2.2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	17
Tabel 2. 3 Sasaran Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	86
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	88
Tabel 2. 4. 1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Magelang .....	96
Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Magelang.....	123
Tabel 3. 1 Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang.....	125
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	126
Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Magelang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	130
Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	165

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang.

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan evaluasi hasil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; pembahasan Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk tahun kedua periode Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2023, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Renja K/L, dan Renja Tahun 2023 BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.

- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2023 meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan  
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Magelang

3.3 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Magelang

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;

- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta subag/subid pelaksana.

Adapun capaian indikator kinerja pada Renja tahun 2021 sebagai bahan evaluasi bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021**

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capai an	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
1.	Tujuan : Mewujudkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah  Sasaran : Terciptanya laporan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan	1. Nilai Opini BPK atas LKPD  2. Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP	100%  111,11 %	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran  2.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan  2.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi	100%  100%
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase Penganggaran sesuai ketentuan	100%
				Kegiatan Koordinasi	Persentase penatausa	100%

				dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	haan keuangan sesuai ketentuan	
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	100%
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
2.	<u>Tujuan</u> : Mewujudkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan. <u>Sasaran</u> : Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	110,06 %	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	108,33 %
		Barang Milik yang didayagunakan	100%			
		Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah	100%	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan,	101,04 %

		yang tepat waktu			penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	
		Pelaporan Tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100%			
3.	Tujuan : Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Derajat otonomi Fiskal	78,92 %	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100%
		Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap dana Pusat	96,76 %			
	Sasaran : Tercapainya peningkatan pendapatan daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	96,33 %	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	126,82 %
		Rasio Pajak daerah terhadap PAD	99,39 %			
		Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD	67,31 %			

Sumber : LKjIP 2021 BPKAD Kota Magelang

Dari hasil evaluasi kinerja pada Tahun 2021, tidak ada kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program

maupun kegiatan BPKAD Kota Magelang pada tahun 2021 telah tersusun dengan baik. Jika dilihat dari capaian indikatornya yang rata-rata 100% bahkan lebih bisa pula dikatakan jika program dan kegiatan yang ada di BPKAD Kota Magelang pada Tahun 2021 telah berhasil menunjang terhadap pencapaian indikator-indikator kerjanya.

Sesuai dengan hasil evaluasi di atas serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dalam artian bahwa seluruh Program dan Kegiatan telah berhasil mencapai target yang ditentukan. Bahkan terdapat 1 Program dan 2 Kegiatan yang capaian indikator kerjanya melebihi dari target, yaitu :

1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,33%
2. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,04%
3. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 126,82%.

Hal tersebut tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung, di antaranya adalah :

1. Kinerja dari Pengurus Barang OPD yang semakin meningkat dalam menyusun laporan Barang Milik Daerah
2. Terdapat aplikasi berupa Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset) yang memudahkan dalam pelaporan pengelolaan barang.
3. Kesadaran Wajib Pajak (WP) yang semakin tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajaknya secara tertib.
4. Adanya pengembangan-pengembangan pada Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah yang memudahkan Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menyetorkan pajak/retribusi daerah yang menjadi kewajibannya.

Namun terdapat pula beberapa program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diatas yang capaiannya sesuai target, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dalam proses penyusunan anggaran
2. Semua perangkat daerah telah paham dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam penatausahaan keuangan daerah
3. Semua perangkat daerah telah paham dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam menyusun laporan keuangan daerah
4. Penerapan inovasi dalam peningkatan pelayanan dan monitoring pembayaran pajak daerah.

**Tabel 2. 2.1**  
**Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

<b>No.</b>	<b>Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target</b>	<b>Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target</b>	<b>Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target</b>	<b>Solusi yang dilakukan</b>
<b>1.</b>	Selama kurun waktu tahun 2016-2021, realisasi			Menghitung Derajat Otonomi Fiskal adalah dengan

	<p>pendapatan daerah secara keseluruhan cenderung mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2021 terjadi penurunan pendapatan daerah dari komponen dana perimbangan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Tahun 2021 masih dialihkan untuk</p>			<p>membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah. Salah satu solusinya adalah meningkatkan PAD melalui peningkatan kontribusi BUMD yang berupa pengelolaan BUMD secara profesional lagi.</p>
--	--	--	--	---

	<p>penanganan pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi sehingga DAU dan DAK yang diterima oleh Pemerintah Kota Magelang berkurang dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari komponen PAD yang berupa Pajak Daerah juga mengalami penurunan terutama dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, serta Pajak Parkir.</p>			
<b>2.</b>	<p>Indikator Rasio Ketergantungan Keuangan terhadap Dana Pusat menunjukkan tingkat kemampuan Kota Magelang dalam</p>		<p>Kesadaran Wajib Pajak (WP) yang semakin tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran</p>	<p>Diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan menggali potensi-potensi</p>

<p>membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dilihat dari realisasinya masih menunjukkan angka yang tinggi serta penurunan dari tahun 2020. Penurunan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami kontraksi. Lesunya perekonomian memicu daya beli yang rendah sehingga sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu sektor jasa dan</p>		<p>pajaknya secara tertib</p>	<p>pendapatan yang ada.</p>
--	--	-------------------------------	-----------------------------

	pariwisata yang menjadi salah satu andalan sumber pendapatan di Kota Magelang belum bisa berjalan normal akibat dampak pandemi Covid-19.			
<b>3.</b>		Semua perangkat daerah telah paham dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam menyusun Laporan Keuangan		Lebih intensif dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang di OPD

*Sumber: LKjIP Tahun 2021 BPKAD Kota Magelang*

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>Renja Tahun 2020</b>										
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan	Cakupan tertib administrasi pelayanan, pemeliharaan		100%						

		an sarana prasarana, pelaporan kinerja dan keuangan, serta penataan arsip OPD yang sesuai dengan ketentuan.								
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan tersedianya dokumen perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah sesuai		100%						

		dengan ketentuan								
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD		12 dokumen						
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester		2 jenis laporan						
	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan		2 jenis dokumen						
	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi		1500 berkas						
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	laporan akuntabilitas kinerja SKPD		1 dokumen						

	Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD									
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA		2 dokumen						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar		12 bulan						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet		12 bulan						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan		12 bulan						
	Penyediaan jasa pemeliharaan	perpanjangan STNK		65 kendaraan						

	dan perizinan kendaraan dinas/operasional	dan KIR pick up								
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan		22 jenis/item						
	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor		48 jenis						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan		15 jenis						
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung		17 jenis						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	tersedianya bahan bacaan		3 jenis						

	perundang-undangan									
	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor		3 jenis						
	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman		12 bulan						
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah		12 bulan						
	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan		3 orang jaga malam dan 4 orang tenaga kontrak /honorer daerah						
	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian		82 file						

	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata		40000 dokumen						
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara		1 unit						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara		52 unit						
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara		39 unit						
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara		6 jenis						

	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki		37 buah						
	Pengadaan peralatan gedung kantor	komputer, printer, scanner, ups		10 buah						
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC, camera, mesin penghancur kertas		12 buah						
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah									
	Mewujudkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah	Nilai Opini BPK atas LKPD		WTP						
	Terciptanya laporan	Persentase Laporan		100%						

	pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan	Keuangan yang disusun sesuai SAP								
	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan		12 laporan						
	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	perwal ASB		1 perwal						
	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD dan RKPA SKPD		28 Dokumen						
	Penyusunan laporan	laporan posisi kas		12 laporan						

	posisi kas daerah	daerah setiap bulan								
	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD		4 laporan						
	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi		29 OPD						
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK		7 Laporan						
	Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah		1 Perda						
	Penyusunan rancangan peraturan	rancangan perda		1 raperda						

	daerah tentang APBD	tentang APBD								
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD		3 dokumen						
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD		1 raperda						
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentangpe		2 raperwal						

		njabaran perubahan APBD								
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019		2 dokumen						
	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019		2 dokumen						
	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018		2 dokumen						
	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen		2 dokumen						

		perubahan PPAS 2018								
	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti		29 OPD						
	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD		29 OPD						
	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasi nya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan , pengelolaan anggaran		29 OPD						
	Penyusunan Laporan Informasi	laporan informasi anggaran		2 laporan						

	Penganggaran Daerah	daerah 2020 dan perubahan 2019								
	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti		29 OPD						
	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD		29 OPD						
	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah		74 sekolah						
	Workshop pengelolaan	peserta workshop		73 pegawai						

	keuangan daerah	pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD								
	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah		12 laporan						
	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD		6 laporan						
	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai		3000 SP2D						

	SPM, SP2D dan cek	dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregristrasi)								
	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan		10 jenis						
	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan		700 SPM						
	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas		10 kegiatan						
	Penatausahaan Administrasi Belanja	jumlah penatausahaan permohonan		800 berkas						

	Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	an bantuan dan tak terduga								
	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan		1100 SP2D						
	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan		1500 berkas						
	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D		4 jenis dokumen						
	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS		470 daftar gaji						
	Penyusunan Sistem	jumlah sistem		1 aplikasi						

	informasi pengelolaan keuangan daerah	informasi keuangan daerah yang terintegrasi								
	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan		12 dokumen						
	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti		348 laporan OPD						
	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan		12 laporan						
	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD		12 laporan						
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan	jumlah bendahara dan PPK		120 orang						

	Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	yang dibina								
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran		1 dokumen						
	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan		12 laporan						
	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah		2 kegiatan						
	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan	sistem pengelolaan		1 dokumen						

	keuangan daerah	keuangan daerah								
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggung jawaban APBD		1 perda						
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD		1 perwal						
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan									
	Program Peningkatan, Pengembangan dan									

Pengelolaan Barang Milik Daerah										
		Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang		77,91%						
		Barang Milik yang didayagunakan		100%						
		Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu		100%						
		Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah		100%						

		yang tepat waktu								
	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda		223 bidang						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara		18 unit						
	Monitoring Penggunaan/ Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang		4 laporan						
	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung	jumlah pembayaran PBB		20 SPPT						

	kantor/runderin/mess	gedung kantor								
	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD		13 orang						
	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot		1 laporan						
	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD		4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)						
	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara		3 kegiatan penelitian						

		yang dimohon warga								
	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah		8 jenis laporan						
	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD		185 pejabat pengelolaan barang						
	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah		10 dokumen						
	Penyelamatan aset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah		12 laporan bulanan						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara		2 lapangan						

		selama 1 tahun								
	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak		4 paket						
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir		12 kegiatan						
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun		7 rumah dinas/mess						
	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah		4 kegiatan						
	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan		4 kegiatan						

	Barang Milik Daerah	dan/atau pemusnahan								
	Penjualan aset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual		3 paket						
	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah		12 bidang						
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 18 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 5 bus		18 unit						
	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	nilai dasar penjualan BMD		3 kegiatan						
	Penilaian Barang Milik	tersedianya hasil		11 kegiatan						

	Daerah untuk Pemanfaatan	penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD								
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun		3 gedung kantor						
	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur		2 bidang						
	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah Pemkot		3 Kecamatan						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/mes								

	Dinas/Mess Barang Pengelola	s Barang Pengelola								
	Program Peningkatan, Pengembang an dan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
	Mewujudkan optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah	Derajat otonomi fiskal		26,56%						
		Rasio Ketergantun gan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat		67,01%						
		Persentase Pertumbu han PAD		6,16%						
		Rasio Pajak		12,38%						

		Daerah terhadap PAD								
		Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD		1,78%						
	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	terdistribusinya SPPT		36200 SPPT						
	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan		1 peta obyek pajak PBB						
	Implementasi Tapping Box	laporan data transaksi elektronik		100 laporan						

		per wajib pajak								
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair		4 laporan, pameran						
	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	laporan potensi subyek dan obyek pajak		4 laporan						
	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB		12 laporan, 1200 wajib pajak						

	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak		12 laporan						
	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggalan Pajak Daerah	data tunggakan pajak daerah yang tersedia		120 data wajib pajak						
	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT		3 kegiatan , 36200 SPPT						
	Pengelolaan Data Dan	pelayanan dan pematkhi		12 bulan						

	Informasi PBB	ran data PBB								
	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang		12 bulan						
	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD		12 bulan						
	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak		6 LHP atas wajib pajak						
	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan		17 kelurahan						
	Penyelesaian Keberatan dan	jumlah SK pemberian pengurangan pajak		50 SK						

	Pengurangan Pajak Daerah	daerah dan SK pembebasan pajak daerah								
	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)		28 laporan						
	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain		16 laporan						

		pendapatan								
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta		540 wajib pajak						
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda Retribusi Jasa Usaha		1 Raperda						
	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	perwal Pajak Daerah, Perwal Retribusi Daerah, Perwal BPHTB		1 perwal						
	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian		12 laporan						

			target pendapata n daerah									
			Penatausaha an Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausa haan Pajak Reklame, Laporan Penatausa haan PAT		800 SKPD Pajak Reklame , 960 SKPD PAT, 12 Laporan Penatau sahaan Pajak Reklame , 12 Laporan Penatau sahaan PAT						
<b>Renja Setelah Tahun 2020</b>												
0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/K ota	Tingkat Pemenuha n Kebutuha n (TPK) perencana an pengangga ran dan	100(%)		100%	100%	100%	96.67%	98.33%	98.33%

					evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.								
01	201			Perencanaan, Penganggaran	Cakupan ketersediaan	100 (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

				n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	an (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD								
01	2011	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
01	2011	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

01	2011	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
01	2011	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
01	2011	05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

				Perubahan DPA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
01	2011	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%

0	20			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administra si keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100 (%)		100%	100%	100%	1 00%	1 00%	100%
0	20	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/b ulan		55 Orang/ bulan	55 Orang/b ulan	100%	55 Orang/bu lan	55 Orang/b ulan	100%
0	20	03		Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	24 dokumen		24 dokum en	24 dokume n	100%	24 dokumen	24 dokumen	100%

01	2020	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
01	2020	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	100 (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

01	2015	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
01	2016			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100 (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2016	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	100%	35 Paket	35 Paket	100%
01	2016	02		Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan	4 Paket		0 Paket	0 Paket	100%	1 paket	2 paket	50%

				Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
01	2016	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	100%	80 Paket	80 Paket	100%
01	2016	05		Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	15 Paket	100%
01	2016	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

					yang Disediakan								
016	2007			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	100%	22 Paket	22 Paket	100%
016	2008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	100%	40 Laporan	45 Laporan	90%
016	2009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	100%	40 Laporan	45 Laporan	90%
018	20			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan	100 (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah								
01	2018	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3500 Laporan		2100 Laporan	2100 Laporan	100%	2100 Laporan	2800 Laporan	80%
01	2018	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
01	2017			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintah	100 (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

					han daerah								
01	2017	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit		0 unit	0 unit	100%	0 Unit	0 Unit	100%
01	2017	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
01	2017	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit		8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	100%

					yang Disediakan								
0 1	20 17	08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 unit		0 Unit	0 Unit	100%	0 unit	0 unit	100%
0 1	20 19			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Cakupan pemelihara an barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerinta han daerah	100 (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
0 1	20 19	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	24 Unit		24 Unit	24 Unit	100%	24 unit	24 unit	100%

				Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
01	2019	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit		63 Unit	63 Unit	100%	63 unit	63 unit	100%
01	2019	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	100%	16 Unit	16 Unit	100%
01	2019	08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	3 unit	3 unit	100%

					yang Dipelihara								
0 1	20 19	09		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100%
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah									
					1. Persentase capaian pengelolaa n keuangan daerah bidang anggaran	100,00%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
					2. Persentase	100,00%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

					capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan								
					2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2021			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase Penganggaran sesuai ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2021	01		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen KUA dan	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

				KUA dan PPAS	PPAS yang Disusun								
02	2021	02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
02	2021	03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen		28 dokumen	28 dokumen	100%	28 dokumen	28 dokumen	100%
02	2021	04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen		28 dokumen	28 dokumen	100%	28 dokumen	28 dokumen	100%
02	2021	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

				Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Daerah tentang Penjabaran APBD								
02	2021	08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
02	2022			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	80%		80%	80%	100%	80%	80%	100%

02	2021	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen		28 dokumen	28 dokumen	100%	28 dokumen	28 dokumen	100%
02	2021	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen		28 dokumen	28 dokumen	100%	28 dokumen	28 dokumen	100%
02	2022	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112 dokumen		112 dokumen	112 dokumen	100%	112 dokumen	112 dokumen	100%
02	2022	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%

0	20	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 dokumen		16 dokumen	16 dokumen	100%	16 dokumen	16 dokumen	100%
0	20	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,	20 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%

			Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungut									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					an/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
02	2022	09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
02	2022	10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

				Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	si Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
0203				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

0202	03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	103 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
0202	03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

0203	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
0203	08	Penyusunan Analisis Laporan	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

				Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
02	2023	09		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
02	2023	10		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

02023	11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	103 Orang		103 Orang	103 Orang	100%	103 Orang	103 Orang	100%
02024			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
02024	09		Pengelolaan Dana	Jumlah Laporan Hasil	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

				Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak								
03				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	85,71%		85,71%	85,71%	100%	85,71%	85.71%	100%
03	201			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	68,34%		68,34%	68,34%	100%	68,34%	68.34%	100%
03	201	01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
03	201	03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 dokumen		7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%

031	2015		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
031	2016		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
031	2017		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
031	2018		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik	6 laporan		6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%

					Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah								
031	2010	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen		7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
031	2011	11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%

				Barang Milik Daerah	rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
031	2012	12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 laporan		14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	14 laporan	100%
031	2013	13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	112 Orang		112 Orang	112 Orang	100%	112 Orang	112 Orang	100%

04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	110.06%		100%	100%	100%	104,19%	102.09%	92.76%
04	201			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%		100%	126.82%	126.82%	100%	113.41%	113.41%
04	201	01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
04	201	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 laporan		4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%

04	201	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	17 Laporan	100%
04	201	07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	800 Obyek Pajak		800 Obyek Pajak	800 Obyek Pajak	100%	800 Obyek Pajak	800 Obyek Pajak	100%
04	201	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan	36000 Dokumen		36000 Dokumen	36000 Dokumen	100%	36000 Dokumen	36000 Dokumen	100%

					Pajak Daerah								
04	201	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
04	201	11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
04	201	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasa	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%

					n Pajak Daerah								
0 4	20 1	14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan		4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 3**  
**Sasaran Strategi**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022 (TWI)</b>	<b>%</b>
Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	89,76%	68,89%	76.75%
Meningkatnya kualitas pengelolaan	Persentase Capaian Akuntabilitas	89,77%	50,01	55.71%

Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,25%	30,54	120.95%

Apabila dilihat dari tingkat kemajuan yang dicapai dari masing-masing indikator sampai dengan triwulan I tahun 2022 untuk indikator pencapaian sasaran strategis diperoleh 1 (satu) indikator dengan prosentase atau tingkat capaian sama dengan 100%, dan 3 (tiga) indikator yang tingkat kemajuannya lebih dari 100%. Maka bisa disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran BPKAD Kota Magelang telah baik.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Keuangan, disajikan dalam tabel berikut ini

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kota Magelang**

No	Indikator	SPM/ stan dar nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Indikator Renstra 2016-2021</b>												
	Nilai Opini BPK atas LKPD	√	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP	-	-	90%				100%				
	Derajat Otonomi Fiskal	-	-	35.62%				28.11%				
	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	-	-	63.65%				65.71%				
	Persentase Pertumbuhan PAD	-	-	10,21%				9,84%				
	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	-	-	12%				11,93%				

	Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD	-	-	2,91%				1,96%				
	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	-	-	80%				88,05%				
	Barang Milik yang didayagunakan	-	-	100%				100%				
	Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu	-	-	100%				100%				
	Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	-	-	100%				100%				
<b>Indikator Renstra 2021-2026</b>												
	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	-	-		89,28%	91,09%	92,03%		96,61%	91,09%	92,03%	
	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-		89,76%	91,43%	91,43%		96,67%	91,43%	91,43%	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	-	-		100%	100%	100%		96,67%	100%	100%	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	-	-		100%	100%	100%		81,98%	100%	100%	

Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	-	-		82,76%	100%	100%		100%	100%	100%	
Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-		88,79%	89,77%	90,76%		96,56%	89,77%	90,76%	
Cakupan Pengelolaan BMD	-	-		85,71%	85,71%	85,71%		71,43%	85,71%	85,71%	
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	-	-		32,02%	36,16%	34,61%		36,78%	36,16%	34,61%	
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	-	-		23,82%	26,05%	25,25%		42%	26,05%	25,25%	
Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah				100%	104,19 %	110,00 %		102,65 %	104,19 %	110,00%	

### **2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Pertumbuhan pendapatan asli daerah rendah;
2. Belum optimalnya pemanfaatan aset sebagai potensi PAD;
3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditingkatkan.

#### **2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Bedasarkan Peraturan Walikota Nomor 188 /29/432.319 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

Tugas :

1. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya;
4. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
5. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
7. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;

8. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
10. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup tugasnya;
11. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
12. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
13. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang difokuskan pada pelayanan urusan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Beberapa permasalahan dan hambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana berdasarkan ketentuan ini terdapat beberapa substansi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah khususnya terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah
- b. fenomena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 juga memiliki imbas yang cukup signifikan dalam perhitungan prediksi pergerakan perekonomian di seluruh wilayah, termasuk di Kota Magelang khususnya dalam penentuan kebijakan pendanaan daerah.
- c. Amanat dari PP Nomor 12 Tahun 2019 agar daerah memenuhi kewajiban-kewajiban belanja wajib yang besarnya ditentukan peraturan perundangan yang berlaku. Ketidakpatuhan akan ketentuan ini berakibat pada penundaan transfer atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum. Oleh karena itu perlu kecermatan dalam penganggaran dan pengambilan kebijakan belanja daerah

### **2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional**

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu **“Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia”** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

- MISI 1 Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.
- MISI 2 Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.
- MISI 4 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
- MISI 5 Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan Keuangan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-3 Kota Magelang yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif

#### **2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan**

Dalam meningkatkan pelayanan urusan/bidang , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Belum terpenuhinya kualitas penganggaran sesuai dengan ketentuan;
- b. Belum efektifnya proses penatausahaan keuangan;
- c. Penyajian LKPD kurang sesuai dengan SAP;
- d. Kurang optimalnya penerimaan PAD;
- e. Penyajian usulan RKBMD dari OPD kurang tepat waktu;
- f. Pemanfaatan dan pengamanan BMD yang belum optimal;
- g. Kompetensi SDM Pengelola Barang yang masih kurang.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;
- b. Komitmen semua pegawai untuk mencapai visi dan misi Kota Magelang
- c. Ketersediaan SDM yang lebih dapat dioptimalkan
- d. Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang bias dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Mgelang.

### **2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023**

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah pada tahun 2023
- b. Menetapkan kerangka pendanaan yang bisa menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep money follow programme priority
- c. Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah.

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Rancangan awal Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 0 (nol) program dan 0 (nol) kegiatan, Urusan Pilihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 03 program dan 06 kegiatan. Serta 01 program pendukung dan 06 Kegiatan untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2. 4.1**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023**  
**Kota Magelang**

Nama Perangkat Daerah: BPKAD Kota Magelang

lembar... dari...  
 ... ..

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	6,915,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	6,915,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2,854,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2,854,000	

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2,689,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2,689,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3,317,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3,317,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	1 dokumen	3,470,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen	3,470,000	

			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 laporan	62,276,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 laporan	62,276,000	

7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	10.085.548.940	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	10.085.548.940	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 dokumen	13,297,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 dokumen	13,297,000	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	18 Laporan	55,814,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	18 Laporan	55,814,000	

			riwulanan /Semester an SKPD					/Semestera n SKPD			
1 0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Magel ang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolaha n Administra si Kepegawai an	12 Dokum en	2,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Magela ng	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	12 Dokum en	2,000,000	
1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Kota Magel ang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor yang disediakan	35 paket	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Kota Magela ng	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor yang disediakan	35 paket	6,000,000	
1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kota Magel ang	Jumlah paket peralatan dan perlengkap an kantor	4 paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kota Magela ng	Jumlah paket peralatan dan perlengkap an kantor	4 paket	-	

			yang disediakan					yang disediakan			
1 3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	80 paket	15,464,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	80 paket	15,464,000	
1 4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	10,379,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	10,379,000	
1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	5,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	5,400,000	
1 6	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material	25 paket	6,953,000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material	25 paket	6,953,000	

			terial yang Disediakan					rial yang Disediakan			
17	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 laporan	18,536,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 laporan	18,536,000	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	77,874,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	77,874,000	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3500 laporan	75,954,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3500 laporan	75,954,000	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 laporan	277,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 laporan	277,000,000	

			yang Disediakan					yang Disediakan			
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 laporan	110,782,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 laporan	110,782,000	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 unit	211,616,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 unit	211,616,000	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64 unit	382,973,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64 unit	382,973,000	

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 unit	70,306,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 unit	70,306,000	
25	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Magelang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	4 unit	222,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Magelang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	4 unit	222,000,000	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	777,326,103	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	777,326,103	

27	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	57,683,850	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	57,683,850	
28	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	27,465,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	27,465,000	
29	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	42,445,500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	42,445,500	
30	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Perubahan RKASKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	31,579,500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Perubahan RKASKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	31,579,500	
31	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	9,601,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	9,601,000	

3 2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Magel ang	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi	28 Dokum en	7,343,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Magela ng	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi	28 Dokum en	7,343,000	
3 3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Magel ang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabara n APBD	2 Dokum en	126,632,2 50	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Magela ng	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokum en	126,632,2 50	
3 4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Magel ang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabara	2 Dokum en	92,699,65 0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Magela ng	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokum en	92,699,65 0	

	tentang Penjabaran Perubahan APBD		n Perubahan APBD			tentang Penjabaran Perubahan APBD		Perubahan APBD			
35	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	70,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	70,000,000	
36	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112 Dokumen	9,186,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112 Dokumen	9,186,000	
37	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	11,117,000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	11,117,000	

38	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	31,829,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	31,829,000	
39	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,	Kota Magelang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	2 Laporan	56,258,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,	Kota Magelang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	2 Laporan	56,258,000	

	dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan			dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
--	---	--	---	--	--	---	--	---	--	--

			ngan dan Penyetoran Perhitunga n Pihak Ketiga (PFK)								
4 0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Magel ang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsilia si Data Penerimaan dan Pengeluara n Kas serta Pemungut an dan Pemotonga n atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokum en	106,940,0 00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Magela ng	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokum en	106,940,0 00	
4 1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	Kota Magel ang	Jumlah Petunjuk Teknis Administra si Keuangan	1 Dokum en	21,339,00 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	Kota Magela ng	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	1 Dokum en	21,339,00 0	

	Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
4 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO, dan Beban	102 Dokumen	34,963,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO, dan Beban	102 Dokumen	34,963,000	

4 3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	30,571,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	30,571,000	
4 4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kota Magelang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen	81,190,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kota Magelang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen	81,190,000	

	Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota		Pertangu ngjawaban Pelaksana an APBD Kabupaten /Kota			Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota		jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota			
4 5	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD	Kota Magel ang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertangu ngjawaban Pelaksana an APBD	2 Dokum en	12,226,00 0	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD	Kota Magela ng	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokum en	12,226,00 0	
4 6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggar aan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Magel ang	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasion al Penyelengg araan Akuntansi Pemerinta h Daerah	1 Dokum en	36,167,00 0	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggar aan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Magela ng	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelengga raan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokum en	36,167,00 0	

47	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	Hapus Sub Kegiatan
48	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	103 Orang	74,467,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	103 Orang	74,467,000	
49	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat	12 Laporan	7,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	7,000,000,000	

			dan Mendesak								
50	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	19,229,000	Penyusunan Standar Harga	Kota Magelang	Jumlah Standar Harga yang Disusun Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	19,229,000	
51	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	45,021,000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	45,021,000	
52	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	20,540,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	20,540,000	

53	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	174,645,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	174,645,000	
54	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	56,506,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	56,506,000	
55	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	380,645,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	380,645,000	
56	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	6 Laporan	242,961,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	6 Laporan	242,961,000	

			Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah					Penilaian Barang Milik Daerah			
5 7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan , Pemindahtan ganan, Pemusnahan , dan Penghapusa n Barang Milik Daerah	Kota Magel ang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisa si Penggunaa n, Pemanfaat an, Pemindaht anganan, Pemusnah an, dan Penghapus an Barang Milik Daerah	7 Dokum en	79,428,56 6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan , Pemindahtan ganan, Pemusnahan , dan Penghapusa n Barang Milik Daerah	Kota Magela ng	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan , Pemanfaata n, Pemindahta nganan, Pemusnaha n, dan Penghapusa n Barang Milik Daerah	7 Dokum en	79,428,56 6	
5 8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Magel ang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 Lapora n	86,157,80 0	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Magela ng	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 Lapora n	86,157,80 0	

59	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	200 Orang	35,610,000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	200 Orang	35,610,000	
60	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1,431,540,000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1,431,540,000	
61	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	18,478,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	18,478,000	

6 2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Laporan	68,985,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Laporan	68,985,000	
6 3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Magelang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	800 Obyek Pajak	24,180,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Magelang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	800 Obyek Pajak	24,180,000	
6 4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000 Dokumen	66,219,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000 Dokumen	66,219,000	

6 5	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	7,879,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	7,879,000	
6 6	Penagihan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	313,596,000	Penagihan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	313,596,000	
6 7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	116,877,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	116,877,000	

68	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	92,185,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	92,185,000	
69	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	39,217,000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	39,217,000	
				TOTAL	<b>23.760.549.159</b>		Kota Magelang		TOTAL	<b>23.760.549.159</b>	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai unsur penunjang pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2023 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut: (tidak ada)

**Tabel 2. 5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2023 Kota Magelang**

Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Magelang

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi

Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang**

<b>No.</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Kota Magelang</b>
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamm dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Dalam Mendukung visi dan misi Walikota Magelang, tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Pemerintahan masuk pada misi ke-3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Misi ke-3 Walikota dan Wakil Walikota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 2**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	1. A = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. B = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	91.09%

				(A+B)/2 x 100%																													
2		Meningkatn ya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang berkualitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Beban</th> <th>Sub kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>30%</td> <td>a. Rencana Strategis (10%), penilaian: Pemenuhan Rencana (2%), Kualitas Rencana (2%) dan Implementasi Rencana (2%) b. Pencapaian Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (1%), Kualitas RKT (1%) dan Implementasi RKT (8%)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20%</td> <td>a. Pemenuhan pengukuhan (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>25%</td> <td>a. Pemenuhan pelaporan (2%) b. Kualitas pelaporan (2,5%) c. Penuhataan pelaporan (4,5%)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10%</td> <td>a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (6%) c. Penuhataan hasil evaluasi (2%)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20%</td> <td>a. Kinerja yang dilaporkan (tercapai) (8%) b. Kinerja yang dilaporkan (tidak tercapai) (12%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (8%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Beban	Sub kategori	1	Pencapaian Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), penilaian: Pemenuhan Rencana (2%), Kualitas Rencana (2%) dan Implementasi Rencana (2%) b. Pencapaian Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (1%), Kualitas RKT (1%) dan Implementasi RKT (8%)	2	Pengukuran Kinerja	20%	a. Pemenuhan pengukuhan (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	3	Pelaporan Kinerja	25%	a. Pemenuhan pelaporan (2%) b. Kualitas pelaporan (2,5%) c. Penuhataan pelaporan (4,5%)	4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (6%) c. Penuhataan hasil evaluasi (2%)	5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (tercapai) (8%) b. Kinerja yang dilaporkan (tidak tercapai) (12%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (8%)	Total		100%		100%
No	Kategori	Beban	Sub kategori																														
1	Pencapaian Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), penilaian: Pemenuhan Rencana (2%), Kualitas Rencana (2%) dan Implementasi Rencana (2%) b. Pencapaian Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (1%), Kualitas RKT (1%) dan Implementasi RKT (8%)																														
2	Pengukuran Kinerja	20%	a. Pemenuhan pengukuhan (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)																														
3	Pelaporan Kinerja	25%	a. Pemenuhan pelaporan (2%) b. Kualitas pelaporan (2,5%) c. Penuhataan pelaporan (4,5%)																														
4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (6%) c. Penuhataan hasil evaluasi (2%)																														
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (tercapai) (8%) b. Kinerja yang dilaporkan (tidak tercapai) (12%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (8%)																														
Total		100%																															
3		Meningkatn ya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>A. Persentas e Dokumen Pengangg aran Daerah yang tepat waktu</p> <p>B. Persentas e pencairan belanja sesuai pengajuan</p> <p>C. Pelapora n Keuangan sesuai SAP</p> <p>DO = (A+B+C)/3 x 100%</p>	91.43%																												
4		Meningkatn ya kualitas	Persentase Capaian	A. rasio jumlah	90.76%																												

		pengelolaan Barang Milik Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	pemanfaatan BMD terhadap potensi pemanfaatan BMD B. Rasio pensertifikat an tanah C. Persentas e pengumpul an usulan RKBMD secara benar dan tepat waktu D. Persentas e pengumpul an Laporan BMD yang benar dan tepat waktu DO : $(A+B+C+D)/$ $4 \times 100\%$	
5	Meningkat nya kemandiria n keuangan daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	A. Anggaran PAD B. Anggaran Transfer Pusat+Provi nsi+Pinjama n	34.61%

				(A/B) x 100%	
6		Meningkatn ya pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	A. PAD tahun( t) B. Penda patan Daerah tahun( t) (A/B) x 100%	25.25%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2023 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2023 pada awalnya disusun sebanyak 07 program. Namun dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, dilakukan beberapa penyesuaian menjadi 04 program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan (4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kota Magelang**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	0	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah,	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua	100%				100%	

						administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	a Kelurahan						
5	02	01	201		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	100%	<b>81,521,000</b>	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	<b>38,042,867</b>
5	02	01	201		Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Magelang,	2 doku	6,915,000	PENDAP ATAN ASLI		2 dokum	7,261,065

			01		Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	men		DAERAH (PAD)		en	
5	02	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	2,854,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	4,058,303
5	02	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	2,689,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	3,765,038

5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	1 dokumen	3,317,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	4,470,638
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	1 dokumen	3,470,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	4,464,023
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	30 laporan	62,276,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 laporan	14,023,800

						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	a Kelurahan						
02	01	202	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	100%	<b>10,154,659,940</b>			100%	<b>9,223,423,493</b>
5	02	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	55 Orang /Bulan	10,085,548,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Orang /Bulan	9,142,595,910
5	02	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik	Kota Magelang, Semu	24 dokumen	13,297,000	PENDAPATAN ASLI		24 dokumen	17,272,868

						asi Keuangan SKPD	a Kecamatan, Semu a Kelurahan			DAERA H (PAD)			
5	02	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	18 Laporan	55,814,000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		18 Laporan	63,554,715
5	02	01	205		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a	100%	<b>2,000,000</b>			100%	<b>2,100,000</b>

5	0	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	12 Dokumen	2,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	2,100,000		
5	0	0	2	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	100%	<b>140,606,000</b>			100%	<b>160,014,488</b>		
5	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan	35 paket	6,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 paket	6,615,000		

						kantor yang disediakan	atan, Semu a Kelura han						
5	0 2	0 1	2 0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	4 paket	0	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		4 paket	1,575,000
5	0 2	0 1	2 0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	80 paket	15,464,000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		80 paket	17,049,060
5	0 2	0 1	2 0 5	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak	Kota Magel ang,		10,379,000	PENDAP ATAN ASLI		15 paket	11,445,000

			0 6			dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 paket		DAERAH (PAD)			
5	0 2	0 1	2 . 0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	5,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 dokumen	5,985,000
5	0 2			0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 paket	6,953,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 paket	7,667,888

5	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	50 laporan	18,536,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 laporan	23,787,540
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	50 laporan	77,874,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 laporan	85,890,000
5	0	0	2	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu	100%	<b>463,736,000</b>		100%	<b>508,598,045</b>

							a Kelura han						
5	0 2	0 1	2 . 0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	3500 lapora n	75,954,00 0	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		3500 lapora n	83,898,04 5
5	0 2	0 1	2 . 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	5 lapora n	277,000,0 00	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		5 lapora n	280,000,0 00
5	0 2	0 1	2 . 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Magel ang, Semu a	4 lapora n	110,782,0 00	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		4 lapora n	144,700,0 00

							Kecamatan, Semu a Kelurahan						
5	02	01	209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	100%	<b>1,664,221,103</b>			100%	<b>1,823,146,005</b>
5	02	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	25 unit	211,616,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 unit	233,306,640
5	02	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Magel	64 unit	382,973,000	PENDAPATAN		64 unit	422,227,000

			09		Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	ang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan			ASLI DAERAH (PAD)		
5	02	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	16 unit	70,306,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 unit	77,512,365
5	02	01	209	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a	4 unit	222,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 unit	233,100,000



							a Kecam atan, Semu a Kelura han						
5	0 2	0 2	2 . 0 1	0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	2 Doku men	57,683,85 0	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		2 Dokum en	60,568,04 3
5	0 2	0 2	2 . 0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	2 Doku men	27,465,00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Dokum en	31,467,00 0

5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	28 Doku men	42,445,50 0			28 Dokum en	0
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	28 Doku men	31,579,50 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		28 Dokum en	35,577,00 0
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu	28 Doku men	9,601,000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		28 Dokum en	10,081,05 0

5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	28 Doku men	7,343,000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		28 Dokum en	7,710,150	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	28 Doku men	126,632,2 50	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Dokum en	0	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Magel ang, Semu a Kelura han	2 Doku men	92,699,65 0	Dana Transfer Umum- Dana		2 Dokum en	95,699,00 0	

					Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kecamatan, Semu a Kelurahan			Alokasi Umum			
5	02	02	201	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	1 Dokumen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
5	02	02	202		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	100%	<b>236,669,000</b>		100%		<b>248,502,450</b>

5	0	0	2	0	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	112 Dokumen	9,186,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	112 Dokumen	9,645,300
5	0	0	2	0	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	12 Dokumen	11,117,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	11,672,850
5	0	0	2	0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu	16 Dokumen	31,829,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Dokumen	33,420,450

					Dana Transfer Lainnya	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	a Kelurahan						
5	02	02	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	56,258,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Laporan	59,070,900	

						Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
5	0	0	2	0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	12 Dokumen	106,940,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	112,287,000
5	0	0	2	1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	1 Dokumen	21,339,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	22,405,950
5	0	0	2	0	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	Kota Magelang, Semu a	100%	<b>269,584,000</b>			100%	<b>327,404,204</b>

							Kecamatan, Semu a Kelurahan						
5	02	02	203	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	102 Dokumen	34,963,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		102 Dokumen	42,526,733
5	02	02	203	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	12 Laporan	30,571,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	36,723,173

5	02	02	203	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	2 Dokumen	81,190,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	112,924,665
5	02	02	203	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	2 Dokumen	12,226,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	18,515,633

5	02	02	203	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	1 Dokumen	36,167,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	42,872,000
5	02	02	203	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	103 Orang	74,467,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103 Orang	73,842,000
5	02	02	204		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu	100%	<b>7,000,000,000</b>		100%	<b>15,000,000,000</b>

							a Kelura han						
5	0 2	0 2	2 · 0 4	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelura han	12 Lapor an	7,000,000, 000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		12 Lapora n	15,000,00 0,000
5	0 2	0 3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Cakupan Pengelolaan BMD	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	85.71	<b>1,140,743 ,366</b>			85.71	<b>1,254,817 ,600</b>
5	0 2	0 3	2 · 0 1		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan,	Kota Magel ang, Semu a	69.31	<b>1,140,743 ,366</b>			74.68	<b>1,254,817 ,600</b>

						dan pemindahtanganan BMD	Kecamatan, Semua Kelurahan						
5	02	03	201	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen 0 Dokumen	19,229,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen 0 Dokumen	21,151,900
5	02	03	201	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	45,021,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	49,523,100

5	0	0	2	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	7 Dokumen	20,540,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Dokumen	22,594,000
5	0	0	2	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	1 Laporan	174,645,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	192,109,500
5	0	0	2	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu	1 Laporan	56,506,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	62,156,600

							a Kelura han						
5	0 2	0 3	2 · 0 1	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	12 Lapor an	380,645,0 00	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		12 Lapora n	418,709,5 00
5	0 2	0 3	2 · 0 1	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Magel ang, Semu a Kecam atan, Semu a Kelura han	0 Lapor an 6 Lapor an	242,961,0 00	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		0 Lapora n 6 Lapora n	267,257,1 00

5	0	0	2	1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	7 Dokumen	79,428,566	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Dokumen	87,371,400
5	0	0	2	1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	14 Laporan	86,157,800	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 Laporan	94,773,500
5	0	0	2	1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	200 Orang	35,610,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Orang	39,171,000



							Kecamatan, Semu a Kelurahan						
5	02	04	201	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	4 Laporan	18,478,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	24,347,610
5	02	04	201	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	17 Laporan	68,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Laporan	90,804,105

5	0	0	2	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	800 Obyek Pajak	24,180,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	800 Obyek Pajak	35,233,695
5	0	0	2	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	36000 Dokumen	66,219,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	36000 Dokumen	85,067,993
5	0	0	2	1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu	12 Dokumen	7,879,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	10,912,545

5	0	0	2	1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	10 Dokumen	313,596,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	383,707,485
5	0	0	2	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	12 Dokumen	116,877,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	20,627,775
5	0	0	2	1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Magelang, Semu a	4 Laporan	92,185,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	21,425,000

							Kecamatan, Semua Kelurahan						
5	0	0	2	1	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	39,217,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	43,138,000
<b>TOTAL</b>									23,760,549,159				42,684,780,717

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2023. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

**Tabel 4. 1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023 (Tahun)	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1				2	3	4		5		6		7		8	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	0	2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi	25%		25%		25%		25%		100%	

						kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.										
5	0	0	2		<b>Perencanaan , Penggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan , penganggara n, dan evaluasi kinerja PD</b>	25%		25%		25%		25%		100%	
5	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan		1,728,7 50		1,728,7 50	2 dokum en	1,728,7 50	-	1,728,7 50	2 doku men	6,915,0 00

					Perangkat Daerah	perangkat daerah										
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	713,500		713,500	1	713,500	-	713,500	1 dokumen	2,854,000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	672,250	-	672,250	1	672,250	-	672,250	1 dokumen	2,689,000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	829,250	-	829,250	-	829,250	-	829,250	1 dokumen	3,317,000

						Dokumen DPA-SKPD										
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	867,50 0	-	867,50 0	-	867,50 0	1	867,50 0	1 doku men	3,470,0 00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	15,569, 000	8	15,569, 000	7	15,569, 000	8	15,569, 000	30 lapor an	62,276, 000

0	0	2	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100 %		100 %		100%		100 %		100%		
5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	2,538,6 64,985	0	2,538,6 64,985	0	2,538,6 64,985	0	2,538,6 64,985	55 Oran g/Bul an	10,154, 659,94 0
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	6	3,324,2 50	6	3,324,2 50	6	3,324,2 50	6	3,324,2 50	24 doku men	13,297, 000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	4	13,953, 500	5	13,953, 500	4	13,953, 500	5	13,953, 500	18 Lapor an	55,814, 000

						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD											
5	0	0	2			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	25%		25%			25%		25%		
5	0	0	2	0		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	500,00 0	3	500,00 0	3	500,00 0	3	500,00 0	12 Dokumen	2,000,000
5	0		2			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	25%		25%			25%		100%		
5	0	0	2	0		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen instalasi	8	1,500,000	8	1,500,000	8	1,500,000	11	1,500,000	35 paket	6,000,000

			06	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan										
5	02	01	206	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20	3,866,000	20	3,866,000	20	3,866,000	20	3,866,000	80 paket	15,464,000
5	02	01	2056	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	2,594,750	4	2,594,750	4	2,594,750	3	2,594,750	15 paket	10,379,000
5	02	01	2066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	3 dokumen	5,400,000
5	02	01	2076	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	1,738,250	6	1,738,250	6	1,738,250	7	1,738,250	25 paket	6,953,000

5	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	4,634,000	10	4,634,000	15	4,634,000	20	4,634,000	50 laporan	18,536,000
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	19,468,500	10	19,468,500	15	19,468,500	20	19,468,500	50 laporan	77,874,000
5	0	0	2	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	25%		25%		25%		25%		100%	
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	875	18,988,500	875	18,988,500	875	18,988,500	875	18,988,500	3500 laporan	75,954,000

5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	69,250,000	0	69,250,000	0	69,250,000	0	69,250,000	5 laporan	277,000,000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	27,695,500	0	27,695,500	0	27,695,500	0	27,695,500	4 laporan	110,782,000
5	0	0	2	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	25%		25%		25%		25%	25%		
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	6	52,904,000	6	52,904,000	6	52,904,000	7	52,904,000	25 unit	211,616,000

					Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	95,743,250	15	95,743,250	25	95,743,250	14	95,743,250	64 unit	382,973,000
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	17,576,500	4	17,576,500	4	17,576,500	4	17,576,500	16 unit	70,306,000
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	0	55,500,000	1	55,500,000	1	55,500,000	2	55,500,000	4 unit	222,000,000

5	0	0	2	0	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	194,33 1,526	3	194,33 1,526	3	194,33 1,526	6	194,33 1,526	12 unit	777,32 6,103
5	0	0	2	2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	DO : Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran, pelayanan penatausahaan keuangan, dan laporan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan	25%		25%		25%		25%		100%	
5	0	0	2	0	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Presentase Penganggaran sesuai ketentuan</b>	0%		25%		35%		40%		100%	

5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-	14,420,963	-	14,420,963	-	14,420,963	2	14,420,963	2 Dokumen	57,683,850
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-	6,866,250	-	6,866,250	-	6,866,250	2	6,866,250	2 Dokumen	27,465,000
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	10,612,000	-	10,612,000	-	10,612,000	28	10,612,000	28 Dokumen	42,448,000
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	7,894,250	-	7,894,250	28	7,894,250	-	7,894,250	28 Dokumen	31,577,000
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28	2,400,250	-	2,400,250	-	2,400,250	-	2,400,250	28 Dokumen	9,601,000
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-	1,835,750	-	1,835,750	-	1,835,750	28	1,835,750	28 Dokumen	7,343,000

5	02	02	201	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	31,658,063	-	31,658,063	-	31,658,063	2	31,658,063	2 Dokumen	126,632,250
5	02	02	201	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang	-	23,174,913	-	23,174,913	-	23,174,913	2	23,174,913	2 Dokumen	92,699,650

						Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	17,500,000	-	17,500,000	-	17,500,000	1	17,500,000	1 Dokumen	70,000,000
5	0	0	2	0	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan</b>	25%		25%		25%		25%		100%	
5	0	0	2	0	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	28	2,296,500	28	2,296,500	28	2,296,500	28	2,296,500	112 Dokumen	9,186,000

5	0	0	2	0	Penatausahaa n Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausaha an Pembiayaan Daerah	3	2,779,2 50	3	2,779,2 50	3	2,779,2 50	3	2,779,2 50	12 Doku men	11,117, 000
5	0	0	2	0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4	7,957,2 50	4	7,957,2 50	4	7,957,2 50	4	7,957,2 50	16 Doku men	31,829, 000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	5	14,064, 500	5	14,064, 500	5	14,064, 500	5	14,064, 500	20 Lapor an	56,258, 000



						Fihak Ketiga (PFK)											
5	0	0	2	0	2	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	3	26,735,000	3	26,735,000	3	26,735,000	3	26,735,000	12 Dokumen	106,940,000
5	0	0	2	1	2	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	-	5,334,750	-	5,334,750	-	5,334,750	1	5,334,750	1 Dokumen	21,339,000



			03	SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi										
5	02	02	203	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	20,297,500	-	20,297,500	2	20,297,500	-	20,297,500	2 Dokumen	81,190,000



						Kabupaten/Kota											
5	0	0	2			<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	25%		25%		25%		25%		100%	
5	0	0	2	9		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3	1,750,000,000	3	1,750,000,000	3	1,750,000,000	3	1,750,000,000	12 Laporan	7,000,000,000
5	0	0				<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Cakupan Pengelolaan BMD	-		-		-		85.71		85.71	
5	0	0	2			<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	-		-		-		69.31		69.31	

5	0	0	2	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-	4,807,250	1	4,807,250	1	4,807,250	1	4,807,250	3 Dokumen	19,229,000
5	0	0	2	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	11,255,250	-	11,255,250	-	11,255,250	1	11,255,250	1 Dokumen	45,021,000
5	0	0	2	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	5,135,000	-	5,135,000	7	5,135,000	-	5,135,000	7 Dokumen	20,540,000
5	0	0	2	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	43,661,250	-	43,661,250	-	43,661,250	1	43,661,250	1 Laporan	174,645,000
5	0	0	2	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	-	14,126,500	-	14,126,500	-	14,126,500	1	14,126,500	1 Laporan	56,506,000

						(LHI) Barang Milik Daerah										
5	0	0	2	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	95,161,250	3	95,161,250	3	95,161,250	3	95,161,250	12 Laporan	380,645,000
5	0	0	2	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	0	60,740,250	2	60,740,250	2	60,740,250	2	60,740,250	6 Laporan	242,961,000
5	0	0	2	1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	-	19,857,142	2	19,857,142	2	19,857,142	3	19,857,142	7 Dokumen	79,428,566



			0 1		Pengelolaan Pajak Daerah											
5	0 2	0 4	2 0 1	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	4,619,500	1	4,619,500	2	4,619,500	1	4,619,500	4 Laporan	18,478,000
5	0 2	0 4	2 0 1	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	17,246,250	-	17,246,250	-	17,246,250	17	17,246,250	17 Laporan	68,985,000
5	0 2	0 4	2 0 1	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200	6,045,000	200	6,045,000	200	6,045,000	200	6,045,000	800 Obyek Pajak	24,180,000

					Bangunan (BPHTB)											
5	0	0	2	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9000	16,554,750	9000	16,554,750	9000	16,554,750	9000	16,554,750	36000 Dokumen	66,219,000
5	0	0	2	1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	3	1,969,750	3	1,969,750	3	1,969,750	3	1,969,750	12 Dokumen	7,879,000
5	0	0	2	1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2	78,399,000	3	78,399,000	2	78,399,000	3	78,399,000	10 Dokumen	313,596,000
5	0	0	2	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	29,219,250	3	29,219,250	3	29,219,250	6	29,219,250	12 Dokumen	116,877,000

5	0	0	2	1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	23,046,250	1	23,046,250	1	23,046,250	1	23,046,250	4 Laporan	92,185,000
5	0	0	2	1	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	9,804,250	-	9,804,250	-	9,804,250	1	9,804,250	1 Laporan	39,217,000

## **BAB V PENUTUP**

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2023.

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai upaya mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2023 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Magelang.

Magelang, Juli 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG



**SUSILOWATI, SE, MT, M.Sc**

Pembina Tk.I

NIP. 19721101 199803 2 008



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 050.24/096/112 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja maupun Perubahan Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

a. mempersiapkan dan mengumpulkan materi kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;

- b. melaksanakan seluruh pengadministrasian pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
- c. melaksanakan analisis dan menyusun dokumen penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; dan
- d. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Walikota.

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 18 februari 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 050.24/096/102 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN  
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Ketua
3.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Wakil Ketua
4.	1 ( satu ) orang Analis Perencanaan Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota

9.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
----	--	---------

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

